

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada Juni 2025 terjadi inflasi y-on-y sebesar 1,52 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,61 pada Juni 2024 menjadi 107,21 pada Juni 2025. Secara month to month (m-to-m), Kabupaten Tanah Laut mengalami inflasi sebesar 0,25 persen. Sementara itu, tingkat inflasi year to date (y-to-d) Kabupaten Tanah Laut bulan Juni 2025 adalah sebesar 0,54 persen.

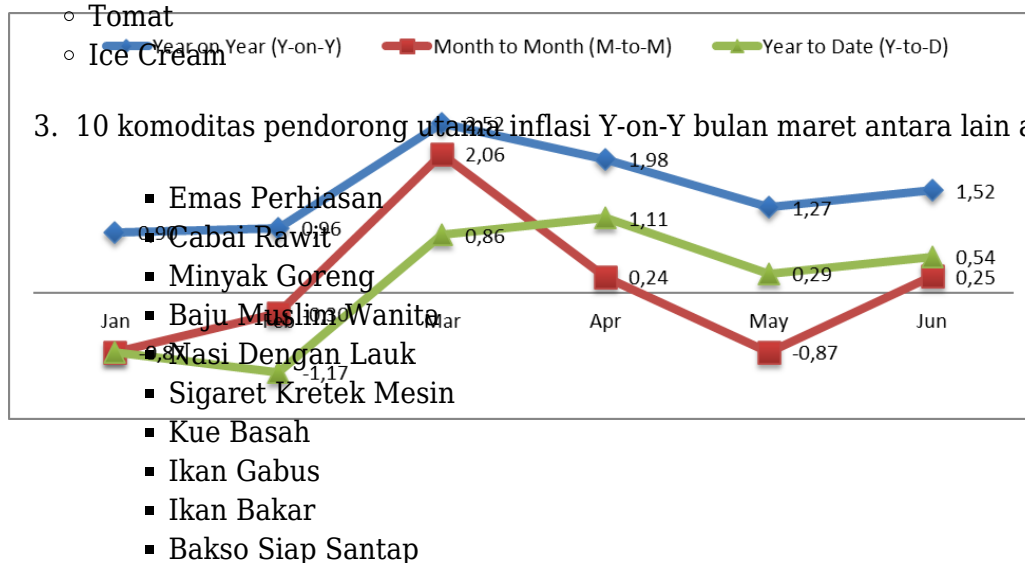
| | | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Tanah Laut | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
| Year on Year (Y-on-Y) | 0,90 | 0,96 | 2,52 | 1,98 | 1,27 | 1,52 |
| Month to Month (M-to-M) | -0,87 | -0,30 | 2,06 | 0,24 | -0,87 | 0,25 |
| Year to Date (Y-to-D) | -0,87 | -1,17 | 0,86 | 1,11 | 0,29 | 0,54 |
| IHK (Indeks Harga Konsumen) | 105,70 | 105,38 | 107,55 | 107,81 | 106,94 | 107,21 |

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga konsumen pada delapan dari sebelas kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,49 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 6,74 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 5,94 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,69 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,64 persen; kelompok transportasi sebesar 0,33 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,30 persen; dan kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,25 persen.

2. 10 komoditas pendorong utama inflasi M-to-M bulan Juni antara lain adalah:

- Bawang Merah
- Emas Perhiasan
- Ikan Bakar
- Jagung Manis
- Bayam
- Taman Kanak Kanak
- Buncis
- Tarif Kendaraan
- Tomat
- Ice Cream



3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Secara umum, strategi pengendalian inflasi yang dilaksanakan di Kabupaten Tanah Laut dirumuskan dengan strategi 4K, yaitu menciptakan Keterjangkauan Harga, menjamin Ketersediaan Pasokan, memastikan Kelancaran Distribusi, dan melakukan Komunikasi Efektif untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat. Kebijakan yang telah dilakukan antara lain:

1. Melakukan monitoring harga bahan pokok setiap minggu dan sidak pasar
2. Melakukan pengecekan ke produsen (pabrik penggilingan gabah dan distributor beras dan pedagang besar minyak) secara berkala.
3. Menyusun Neraca Pangan Strategis untuk memastikan data kecukupan pangan
4. Menyusun kebijakan untuk penyediaan sarana dan prasarana pengembangan hortikultura khususnya aneka cabai dan bawang merah
5. Pelaksanaan tanam bawang dan produk hortikultura lainnya. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada tahun 2025 ini melaksanakan pengembangan lahan untuk bawang merah seluas 10 hektar dari APBD I dan 3 hektar dari APBD II. Luas lahan eksisting bawang merah yang sudah ada 35 hektar tersebar di Kecamatan Pelaihari dan Kecamatan Kurau.
6. Pelaksanaan program Layanan Angkutan untuk masyarakat secara gratis dari kecamatan Bati-Bati ke Ibu Kota Pelaihari dan antar kecamatan lainnya
7. Penganggaran untuk peningkatan kualitas jalan kabupaten
8. Peningkatan jalan usaha tani
9. Menyebarkan informasi harga barang melalui media radio pemerintah daerah
10. Pelaksanaan rapat teknis TPID (foto rapat teknis TPID)

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Program kegiatan pengendalian inflasi tahun 2025 lebih mengarah kepada pengendalian jangka pendek, menengah dan panjang yaitu:
 - a. Jangka Pendek: pelaksanaan kegiatan pasar murah selama tahun 2025 dengan target 45 kali
 - b. Jangka menengah: peningkatan produksi hasil peternakan dan pertanian dalam bentuk hibah bibit dan sarana prasarana serta penambahan lahan untuk pengembangan bawang merah
 - c. Jangka panjang: perencanaan penambahan divisi pangan kepada salah satu BUMD milik Pemkab Tanah Laut sebagai offtaker produk pertanian yang berpengaruh terhadap inflasi dan sebagai stabilisator harga pangan.
2. Komunikasi publik ke masyarakat dapat menjadi salah satu usaha TPID untuk melaksanakan pengendalian harga terutama dari sisi menjaga ekspektasi Masyarakat, salah satunya memanfaatkan pimpinan daerah dan tokoh agama untuk memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mengendalikan konsumsinya.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. optimalisasi pelaksanaan pantauan pasar dan pelaksanaan pasar murah di seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Laut
2. Perlu dilakukan penjajakan untuk kerjasama antar daerah dalam rangka budidaya ikan gabus yang sering muncul sebagai pendorong inflasi. Mengalokasikan anggaran untuk pelatihan petani bawang merah ke Kabupaten Probolinggo dalam rangka implementasi tindak lanjut Kerjasama bawang merah antara Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Probolinggo.
3. Mengajukan kerjasama dengan pihak Bank Indonesia dalam rangka realisasi KAD dengan pihak kabupaten Probolinggo yaitu mendatangkan komoditas bawang merah dengan biaya angkut di bantu pihak Bank Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan.
4. Melaksanakan kegiatan hibah bibit hortikultura (aneka cabai dan bawang merah) kepada poktan yang ditunjuk.
5. Setiap kegiatan pengendalian inflasi yang dilaksanakan oleh SKPD teknis agar dapat dipublikasikan oleh Diskominfotasan sebagai informasi kepada masyarakat.